

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang luas dan penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tanggung jawab yang diemban mencakup berbagai sektor dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan perizinan. Keberhasilan pemerintahan daerah dalam menyediakan layanan yang efektif dan efisien sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat dan perkembangan wilayahnya.

Salah satu tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi dengan baik. Tujuan tersebut mencakup memastikan bahwa layanan pendidikan yang berkualitas tersedia untuk semua warga, layanan kesehatan yang mudah diakses, infrastruktur yang memadai untuk mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta proses perizinan yang efisien untuk mendorong investasi dan pengembangan bisnis (Iskandar, 2020).

Dalam menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah daerah telah mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menyediakan layanan publik. Salah satu pendekatan yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi dan operasi pemerintah.

Menurut Muliawaty dan Hendryawan (2020) pemanfaatan TIK dalam pemerintahan, yang sering disebut sebagai *e-government* atau pemerintahan elektronik, melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Penggunaannya mencakup berbagai inisiatif, seperti pembuatan portal pemerintah online, pendaftaran online, pembayaran pajak online, dan berbagai layanan lain yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat secara elektronik.

Lalu menurut Agustine dan Prawira (2018) konsep *e-government* telah menjadi katalisator utama dalam upaya modernisasi pemerintahan di seluruh dunia. *e-government* bertujuan untuk membuat pemerintahan lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengurangi hambatan

birokrasi dan memberikan akses yang lebih mudah ke layanan publik, *e-government* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Namun, penerapan *e-government* bukanlah sekadar pemindahan proses manual ke dalam bentuk digital. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengubah cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Di sinilah penggunaan dan pengintegrasian *Enterprise Resource Planning* atau ERP menjadi relevan dan tepat guna.

ERP atau *Enterprise Resource Planning* adalah sistem perangkat lunak yang telah digunakan secara luas di berbagai sektor industri dan organisasi. ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dan fungsi organisasi, termasuk keuangan, sumber daya manusia, manajemen persediaan, logistik, produksi, dan lain-lain. Dengan adanya integrasi ERP, berbagai departemen dalam organisasi dapat saling terhubung dan berbagi data secara *real-time*, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya (Sudiantini & Zidane, 2023).

Penerapan ERP pada *e-government* membawa konsep ini ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Kurniawan, Arianingsih, dan Wiyono (2022) dalam pemerintah daerah, ERP dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen, mulai dari keuangan hingga manajemen sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mempercepat pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Meskipun pengintegrasian ERP pada *e-government* menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di pemerintahan daerah, belum semua pemerintah daerah siap untuk mengadopsi teknologi ini. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *e-government* dengan integrasi ERP menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi.

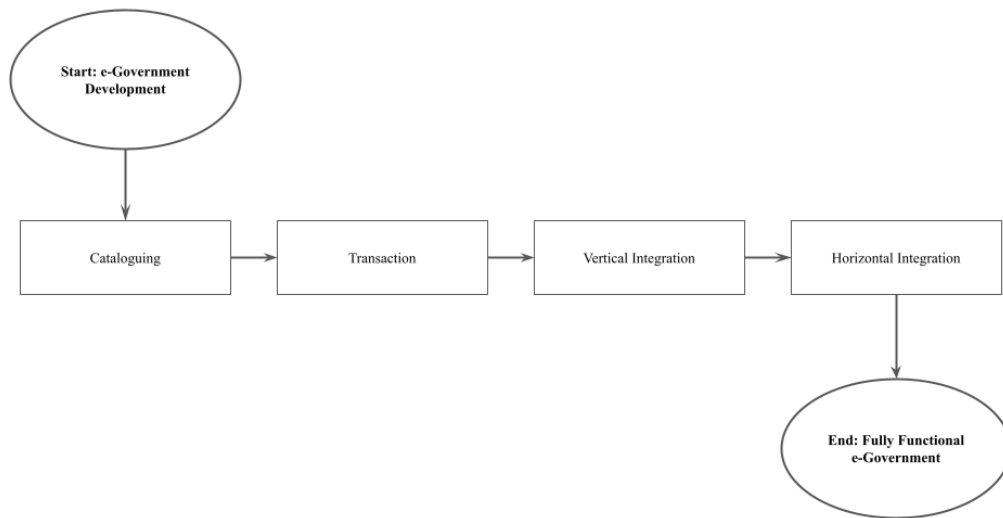
Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, seperti kesiapan teknis, sumber daya manusia, perubahan budaya organisasi, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *e-government* dengan integrasi ERP, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tersebut.

Menurut Putri dan Darmawan (2018) kesiapan *e-government* merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi oleh para *stakeholders* sebelum menerapkan *e-government*. Oleh karena itu kesiapan *e-government* melibatkan dua aspek utama: kesiapan pemerintah dan kesiapan masyarakat pengguna. Kesiapan ini mencakup kemauan dan kapasitas untuk melaksanakan transformasi menuju *e-government*. Faktor-faktor yang mempengaruhi *readiness* terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Faktor Teknologi, Faktor Manusia, dan Faktor Institusional dan selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel I.1.

Tabel I.1 Faktor-Faktor Pembentukan & Pendukung *E-Readiness*
Sumber (Putri & Darmawan, 2018)

Faktor Teknologi	Faktor Manusia	Faktor Institusional
Ketersediaan (availability)	Kepercayaan & Partisipasi Masyarakat	Online Service
		Integrasi
Willingness atau <i>Political Will</i>		
Pendidikan		Kebijakan anggaran
	Kebijakan anggaran	
Penetrasi Internet atau Ketercakupan	Kompetensi TIK	Kebijakan program
		Instrumen Hukum
Biaya		

Lalu dalam 4 tahapan penerapan *e-government* yang dikembangkan oleh Layne dan Lee adalah kerangka kerja penting dalam memahami evolusi *e-government*. Model yang dikembangkan oleh Layne dan Lee menawarkan pandangan komprehensif tentang bagaimana layanan pemerintahan elektronik berkembang dari tahap awal hingga mencapai integrasi penuh. Berikut merupakan tahapan yang digambarkan pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Tahapan *E-Government*

Sumber (Layne & Lee, 2001)

Dalam model yang dikemukakan oleh Layne and Lee, tahapan *e-government* terbagi menjadi:

1. *Cataloguing*: Fokus pada pembangunan kehadiran layanan *online* pemerintah di tengah masyarakat.
2. *Transaction*: Pengembangan *e-government* terfokus pada menghubungkan sistem pemerintahan internal dengan antarmuka *online* untuk transaksi elektronik.
3. *Vertical Integration*: Integrasi vertikal antara pemerintahan daerah, baik pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah pusat untuk fungsi atau peran yang dimiliki.
4. *Horizontal Integration*: *Integrasi horizontal* seluruh fungsi dan layanan yang berbeda.

Lalu kesiapan *e-government* dari pemerintahan di tingkat nasional hingga ke daerah dapat dilihat dalam penelitian terdahulu. Seperti dilihat, pembagian antara tiap-tiap daerah dari tingkat bawah di level kabupaten/kota hingga tingkat nasional di Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai perwakilan dari pemerintahan pusat. Dapat diketahui bahwa kesiapan pemerintah di level pusat cukup siap. Dapat dilihat dalam Tabel I.2.

Tabel I.2 Penilaian e-Readiness Domain Utama STOPE *FRAMEWORK* +
 Anggaran di Kementerian Komunikasi dan Informasi
 Sumber (R. A. Nugroho & Purbokusumo, 2020a)

No	Domain	Persentase (%)	Keterangan	Nilai Relative Weight (%)	Bobot (%)	Skor Akhir
1	<i>Strategy</i>	43,70	Cukup Siap	16	15	6,56
2	<i>Technology</i>	53,14	Cukup Siap	19	20	10,63
3	<i>Organization</i>	50,54	Cukup Siap	18	15	7,58
4	<i>People</i>	45,98	Cukup Siap	16	15	6,90
5	<i>Environment</i>	51,71	Cukup Siap	18	15	7,76
6	<i>Budget</i>	35,49	Belum Siap	12	20	7,10

Dari Tabel I.2 di atas, dapat dilihat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap dalam beberapa domain seperti *Strategy*, *Technology*, *Organization*, *People*, dan *Environment*. Namun, terdapat satu domain, yaitu *Budget*, yang masih dalam kondisi belum siap. Meskipun *Budget* tidak masuk dalam variabel *framework* STOPE, namun bagi lembaga negara dengan *budget* memiliki nilai *relative weight* terendah, sehingga perlu diberikan perhatian khusus untuk meningkatkannya.

Selanjutnya dilihat pada level pemerintahan di tingkat provinsi, dengan mengambil contoh di Provinsi Gorontalo dalam penerapan *Smart Government*, dengan menggunakan 4 faktor utama yaitu institusional. Manusia, teknologi, lalu diakhiri disimpulkan dengan faktor *readiness*. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3 Penilaian e-Readiness Provinsi Gorontalo
 Sumber (Nento, Nugroho, Selo, 2017)

No	Faktor	Persentase (%)	Keterangan
1	Institusional	34,29	Rendah
2	Manusia	64,79	Tinggi
3	Teknologi	68,24	Tinggi
4	<i>Readiness</i>	74,20	Tinggi

Dapat dilihat bahwa Provinsi Gorontalo dengan 3 faktor utama, yaitu faktor institusional yang mewakili persepsi negatif dari instansi di Provinsi Gorontalo, lalu faktor manusia yang tinggi dalam penerapan *e-government* di lingkungan instansi Provinsi Gorontalo, teknologi yang digunakan sudah terhubung dengan baik, dan *readiness* atau tingkat kesiapan Provinsi Gorontalo cukup tinggi.

Lalu dari level kabupaten/kota, dengan mengambil contoh Kota Magelang yang menggunakan *framework* STOPE, dengan 5 domain yaitu *Strategy*, *Technology*, *Organization*, *People*, dan *Environment*, selanjutnya terlihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4 Domain Readiness Kota Magelang
Sumber (Dahlan, Hartanto, & Rizal, 2023)

No	Domain	Persentase (%)	Keterangan
1	<i>Strategy</i>	74,88	Siap
2	<i>Technology</i>	67,26	Siap
3	<i>Organization</i>	70,35	Siap
4	<i>People</i>	61,67	Cukup Siap
5	<i>Environment</i>	68,13	Siap
STOPE		68,65	Siap

Dapat dilihat bahwa ada 4 domain yang berada pada tingkat kesiapan yang siap dan hanya 1 domain yang masih berada pada tingkat yang cukup siap. Berdasarkan hasil evaluasi dengan *framework* STOPE, Pemerintah Kota Magelang memperoleh persentase sebesar 68,65% dan dinyatakan siap untuk melaksanakan *e-goverment*.

Jika dilihat kegagalan penerapan ERP dengan melakukan penilaian *e-readiness* pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di tingkat pusat kementerian, Provinsi Gorontalo di tingkat provinsi, hingga Kota Magelang di tingkat kabupaten/kota, memiliki beberapa faktor utama yang menyebabkannya.

Pada tingkat Kementerian Informasi dan Komunikasi, terdapat kendala dalam alokasi anggaran yang terbatas. Hal ini tercermin dari kurangnya anggaran yang

dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, terutama untuk infrastruktur *e-government*. Keterbatasan anggaran berdampak pada kemampuan Kominfo dalam melaksanakan percepatan implementasi *e-government*, yang seharusnya menjadi prioritas sesuai dengan amanat dari Perpres Nomor 95 tahun 2018. Selain itu, strategi yang jelas dan terstruktur, seperti pembentukan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, *masterplan*, *roadmap*, dan regulasi turunan yang memiliki kekuatan hukum, perlu ditetapkan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam pelaksanaan *e-government*.

Lalu pada tingkat Provinsi Gorontalo, masalah utama adalah kurangnya integrasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Terdapat kesenjangan digital yang cukup besar antara penduduk perkotaan dan pedesaan, yang mengindikasikan bahwa integrasi infrastruktur TIK baik secara horizontal maupun vertikal masih belum optimal. Pemerintah dan instansi terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan integrasi yang lebih baik dalam hal infrastruktur TIK. Selain itu, kesenjangan digital ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap manfaat penggunaan TIK. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan mengenai manfaat penggunaan TIK.

Pada tingkat Kota Magelang, kegagalan dalam implementasi *e-goverment* terkait dengan beberapa masalah dalam domain-strategi. Pada sub-domain *e-leadership*, implementasi *e-sign* belum menjadi program prioritas untuk transformasi digital dalam pelayanan administrasi pemerintah dan layanan publik. Rencana pengembangan masa depan juga tidak mencakup anggaran, infrastruktur, dan kebutuhan personil yang diperlukan untuk implementasi *e-sign*. Oleh karena itu, disarankan agar Pimpinan Daerah menetapkan implementasi *e-sign* sebagai program prioritas dalam upaya mewujudkan transformasi digital di Pemerintah Kota Magelang. Selain itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap rencana *e-government* untuk melengkapi anggaran, infrastruktur, dan kebutuhan personil yang harus disiapkan.

Pengelolaan SDM juga menjadi kendala di tingkat Kota Magelang, dengan distribusi personil TIK yang tidak merata di semua instansi. Rekomendasi untuk masalah ini adalah mengadakan *workshop*, pelatihan, dan bantuan teknis terkait implementasi *e-sign* agar semua personil dapat memahaminya dengan baik. Selain itu, distribusi personil TIK perlu disesuaikan agar merata di seluruh instansi.

Kegagalan penerapan *e-government* pada berbagai tingkatan pemerintahan, baik di Kementerian Kominfo, Provinsi Gorontalo, maupun Kota Magelang, memiliki beberapa faktor umum yang meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya integrasi infrastruktur TIK, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya fokus pada strategi dan pengelolaan SDM. Untuk mengatasi masalah dalam kegagalan implementasi *e-government*, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam alokasi anggaran, peningkatan integrasi infrastruktur TIK, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peningkatan fokus pada strategi dan pengelolaan SDM. Dengan langkah-langkah dengan baik, penerapan *e-government* di berbagai tingkatan pemerintahan dapat menjadi lebih berhasil dan efisien.

Pengintegrasian ERP dalam *e-government* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di pemerintahan daerah. Namun, kesuksesan implementasi *e-government* dengan integrasi ERP tidak selalu terjamin. Dampak dari pengintegrasian ini tergantung pada sejauh mana pemerintah daerah telah mempersiapkan diri untuk mengadopsi teknologi ERP. Oleh karenanya, analisis kesiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian *e-government* dengan mengintegrasikan ERP menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sejauh mana pemerintahan daerah telah mempersiapkan diri, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesiapan tersebut, dan dampak dari pengintegrasian ERP dalam *e-government* terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di pemerintahan daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengadopsi ERP pada *e-government* tidak boleh dianggap enteng. Implementasi ERP dapat melibatkan

biaya yang signifikan, perubahan dalam proses bisnis yang mapan, serta perubahan dalam budaya organisasi (Pederson, 2016; Wardani, 2016).

Untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, penelitian ini akan melakukan studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu atau SKPD Kabupaten Indramayu sebagai representasi dari pemerintah daerah. SKPD di Kabupaten Indramayu adalah seluruh unit pada pemerintahan daerah yang berperan dalam mengelola seluruh pemerintahan di Kabupaten Indramayu.

Untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi modern, penelitian ini akan melakukan studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu. SKPD di Kabupaten Indramayu, sebagai unit pengelola pemerintahan daerah, berperan penting dalam mengelola berbagai aspek administrasi dan operasional pemerintahan. Keberhasilan dalam penerapan teknologi informasi di tingkat SKPD menjadi indikator utama dalam menilai kesiapan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan era digital.

Kabupaten Indramayu sendiri telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang tercermin dalam peningkatan indeks SPBE hingga mencapai skor 3,53 dari skor 5 pada tahun 2023 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024). Berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021, indeks skor SPBE yang diraih Kabupaten Indramayu meningkat dari Tahun 2021 sebesar 2,57. Lalu berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 meningkat nilai indeks SPBE di tahun 2022 menjadi 3,09. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, tetapi juga menegaskan kesiapan Kabupaten Indramayu dalam mengadopsi teknologi informasi secara lebih luas.

Dengan menganalisis kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dalam mengintegrasikan ERP dalam *e-government*, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih konkret tentang sejauh mana pemerintah daerah telah mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini. Hasil dari analisis ini dapat memberikan panduan berharga bagi pemerintah daerah lain yang juga berencana mengadopsi teknologi serupa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian *e-government* dengan mengintegrasikan ERP akan membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi, seperti hambatan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, atau resistensi terhadap perubahan. Selain itu, analisis ini juga akan mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti efisiensi operasional, peningkatan transparansi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Ketika pemerintah daerah mampu mengintegrasikan ERP dalam *e-government* dengan baik, dampaknya dapat terasa pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Proses-proses administratif yang lebih cepat dan efisien dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi bisnis dan investasi (Susanto, Samopa, & Wibowo, 2018).

Selain itu, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan *real-time* dapat membantu pemerintah daerah dalam merespons perubahan lingkungan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan kata lain, integrasi ERP dalam *e-government* bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang kemampuan pemerintah daerah untuk menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Terlepas dari tantangan dan kompleksitas yang mungkin dihadapi, pengintegrasian ERP dalam *e-government* juga dapat menjadi pemicu inovasi dalam pemerintahan. Hal ini dapat merangsang pemikiran kreatif dan pengembangan solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Menurut Septiawan (2021) integrasi ERP dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini adalah langkah

penting menuju pemerintahan yang lebih modern dan adaptif yang mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk *e-government* telah menjadi tren utama dalam modernisasi pemerintahan. Salah satu perkembangan terkini dalam hal ini adalah pengintegrasian *Enterprise Resource Planning* (ERP), yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses bisnis dalam organisasi pemerintah daerah.

Meskipun terdapat potensi besar dalam integrasi ERP dalam *e-government*, belum semua pemerintah daerah siap untuk mengadopsi teknologi ini. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *e-government* dengan integrasi ERP menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tersebut.

Melalui studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana pemerintah daerah telah mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang cepat dan tuntutan dari masyarakat. Hasil dari analisis dapat memberikan penilaian dan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yang berencana mengadopsi teknologi serupa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, dampak dari pengintegrasian ERP dalam *e-government* juga dapat terlihat dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mendorong inovasi dalam pemerintahan, dan menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian “Penilaian Kesiapan Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Sisi

Strategi, Teknologi, Organisasi, Orang, & Lingkungan Dengan Metode *Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS)*” adalah:

- a. Bagaimana signifikansi tiap variabel dari variabel *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment* terhadap kesiapan implementasi *E-Government* bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ?
- b. Bagaimana penilaian kesiapan implementasi *E-Government* di Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Indramayu ditinjau dari variabel *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment* menggunakan SEM-PLS?
- c. Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kesiapan adopsi *E-Government* berdasarkan hasil peninjauan variabel *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment* menggunakan SEM-PLS?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang diajukan, dapat diambil tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengevaluasi hubungan variabel *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment* dengan SEM-PLS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk menganalisis kesuksesan penerapan *E-Government* pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam implementasi *E-Government* melalui hubungan antar variabel .
- c. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ditinjau dari variabel *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment*.

I.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki batasan-batasan yaitu:

- a. Penelitian akan difokuskan pada 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Indramayu.

- b. Penelitian hanya menguji penilaian kesiapan adopsi *E-Government* berdasarkan variabel *Strategy, Technology, Organization, People,* dan *Environment*.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- d. Pengolahan data dan pengujian statistik dilakukan dengan metode SEM-PLS dengan *software* RStudio.
- e. Penelitian ini tidak akan mencakup implementasi *E-Government* tanpa integrasi ERP di pemerintah daerah.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Penilaian Kesiapan Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Sisi Strategi, Teknologi, Organisasi, Orang, & Lingkungan Dengan Metode *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS)” memiliki manfaat yang signifikan bagi penulis, objek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan ilmu pengetahuan secara umum. Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengintegrasian *enterprise resource planning* atau ERP pada penerapan *e-government*, serta mengasah kemampuan analisis dan penelitian. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi modal intelektual yang berharga untuk pengembangan karir di bidang pemerintahan dan teknologi informasi.

Bagi objek penelitian, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu pemerintah daerah Kabuapten Indramayu yang menjadi studi kasus, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi *e-government* yang terintegrasi dengan ERP. Hasil analisis dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai panduan untuk meningkatkan kesiapan dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini juga dapat membantu mereka mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi.

Secara lebih umum, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dengan menggali lebih dalam tentang pengintegrasian ERP dalam *e-government*. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk menjalankan penelitian serupa atau mengembangkan pengetahuan dalam bidang *e-government*, teknologi informasi, dan administrasi publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat yang luas dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta modernisasi pemerintahan daerah secara keseluruhan.

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian mengenai permasalahan, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur bertujuan untuk menjadi data pendukung bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dan mencakup berbagai perspektif mengenai ERP dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government*.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode serta langkah-langkah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan secara rinci bagaimana data-data terkait kesiapan, faktor-faktor pengaruh, dan dampak telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Metode penelitian yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil analisis terkait kesiapan Pemerintahan Daerah dalam mengimplementasikan *e-government* dengan integrasi ERP, berdasarkan studi kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. Dalam bab ini juga akan dibahas temuan-temuan, faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan, serta dampak pengintegrasian ERP dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di pemerintahan daerah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang disajikan di pendahuluan. Saran penelitian dikemukakan pada bab ini untuk penelitian selanjutnya, mencakup saran-saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi terkait dengan pengembangan model dan bidang penelitian yang dapat dieksplorasi di masa mendatang.